

**PERAN KOMISI KEADILAN DAN PERDAMAIAAN PASTORAL
MIGRAN PERANTAU (KKPPMP) DALAM MENANGANI
SEKURITISASI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON
PROSEDURAL DI BATAM TAHUN 2020-2023**

Oleh:

Gilbertus Mowong Putra

Nim. 2005050012

ABSTRAK

PMI Non Prosedural adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak menyelesaikan prosedur penempatan kerja dengan baik. Pekerja migran yang tidak berdokumen ditandai dengan pencatatan yang tidak lengkap, dokumen kerja yang dipalsukan, dan tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan pekerja migran yang tidak berdokumen disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri, tingginya angka kemiskinan, terbatasnya akses terhadap prosedur ketenagakerjaan di luar negeri, janji indah akan gaji yang tinggi dan bahkan kegagalan dalam menaati peraturan. -Prosedur pekerja imigrasi terkait dengan keluarganya. Dalam kajian hubungan internasional, kondisi yang dihadapi pekerja migran dapat dikategorikan sebagai ketidakamanan individu atau kolektif, terutama jika dipertimbangkan dalam kerangka keamanan manusia. Konsep keamanan manusia memandang individu sebagai penerima segala permasalahan keamanan. Konsep ini mendukung gagasan keamanan fisik serta akses terhadap kebebasan dasar, perlindungan sosial dan keamanan ekonomi bagi setiap individu. KKPPMP pun hadir di tengah masyarakat yang merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang merupakan wujud dari kepedulian dan kontribusi dari kondisi buruk serta banyaknya permasalahan yang dialami, adanya keterbatasan pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan serta minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada PMI. Dengan hadirnya lembaga-lembaga non pemerintah dengan strategi dan cara kerjanya yang diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi PMI. Pekerja migran memiliki hak asasi untuk mendapatkan penghidupan yang layak, perlakuan adil di mata hukum, kebutuhan harmonis sebagai manusia. KKPPMP mengajak seluruh lapisan masyarakat, dari kepolisian, pemerintah, LSM dan juga Masyarakat umum untuk bersama-sama dalam menangani kasus PMI non prosedural.

Kata kunci: Penanganan PMI Non Prosedural, Proses sekuritisasi, Keamanan manusia, KKPPMP

**PERAN KOMISI KEADILAN DAN PERDAMAIAN PASTORAL
MIGRAN PERANTAU (KKPPMP) DALAM MENANGANI
SEKURITISASI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON
PROSEDURAL DI BATAM TAHUN 2020-2023**

By:

Gilbertus Mowong Putra

Nim. 2005050012

ABSTRACT

Non-Procedural PMI are Indonesian citizens who work abroad but do not complete job placement procedures properly. Undocumented migrant workers are characterized by incomplete records, falsified work documents, and failure to comply with procedures established by laws and regulations. The existence of undocumented migrant workers is caused by the low quality of education, limited employment opportunities within the country, high poverty rates, limited access to employment procedures abroad, the beautiful promise of high salaries and even failure to comply with regulations. -Immigration worker procedures related to their families. In international relations studies, the conditions faced by migrant workers can be categorized as individual or collective insecurity, especially when considered within the framework of human security. The concept of human security views individuals as recipients of all security problems. This concept supports the idea of physical security as well as access to basic freedoms, social protection and economic security for every individual. KKPPMP is also present in society, which is a non-governmental organization which is a form of concern and contribution to the bad conditions and the many problems experienced, there are limitations in fulfilling the rights that should be obtained and the lack of protection provided by the government to PMI. With the presence of non-governmental institutions with strategies and ways of working that are expected to be able to answer the problems faced by PMI. Migrant workers have the basic right to a decent living, fair treatment in the eyes of the law, and harmonious needs as human beings. KKPPMP invites all levels of society, from the police, government, NGOs and also the general public to work together in handling non-procedural PMI cases.

Keywords: Non-Procedural PMI Handling, Securitization Process, Human Security, KKPPMP